

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
STUDI PADA KANTOR CAMAT PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

TESIS



Oleh

**IRWANSYAH WIJAYA POHAN
NPM. 051801031**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2007**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
STUDI PADA KANTOR CAMAT PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP)
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh

**IRWANSYAH WIJAYA POHAN
NPM. 051801031**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2007**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT STUDI
PADA ANTOR CAMAT PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG

Nama : IRWANSYAH WIJAYA POHAN

NIM : 051801031

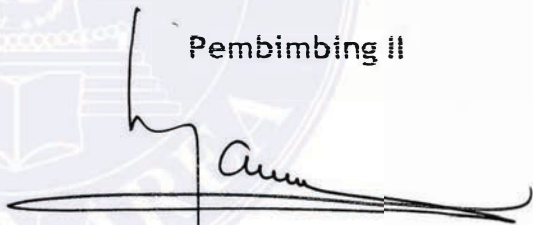
Menyetujui

Pembimbing I



Drs. Kariono, MA

Pembimbing II



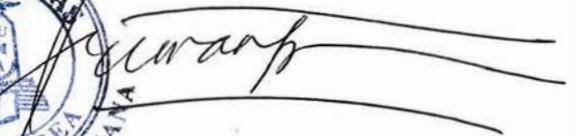
Drs. Usman Tarigan, MS

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik



Drs. Kariono, MA

Direktur



Drs. Heri Kusmanto, MA

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini. Shalawat beriring salam penulis persembahkan atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa khabar tentang nikmat-nikmat Allah terhadap hamba-Nya.

Tesis ini berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT (Studi Pada Kantor Camat Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”**, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama terima-kasih yang terhormat Bapak Drs. Kariono, MA. selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area dan juga sekaligus selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Usman Tarigan, MS, selaku Pembimbing II yang sabar dan memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya yang diberikan selama penulisan tesis dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Prof. DR. H.M. Ya'kub Matondang, MA, yang telah membuka Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.

2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, Drs. Heri Kusmanto, MA. atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
3. Para staf pengajar Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Para Pegawai Administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
5. Bapak Syafrullah, S.Sos, MAP, selaku Camat Percut Sei Tuan beserta staf pegawainya.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan penghargaan juga terima-kasih yang tidak terhingga kepada yang tercinta dan tersayang Ayahanda (Alm.) Ir. H.M. Kotlan Pohan dan Ibunda Hj. Kartini Erlina Hutajulu atas doa dan dorongan selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana, demikian juga buat Ayah (M. Yusuf Dalimunthe) dan Mamak (Mariana Lubis) serta buat isteri (Yessi Wiyuni Dalimunthe) dan anak-anakku Daffa dan Azka, serta abangda Erwin dan adik-adik penulis Yeni, Hera, Indah dan Ade yang selalu berdoa untuk keberhasilan penulis.

Demikian juga terima-kasih penulis ucapkan untuk Abangda Ir. H. Saleh Idoan Siregar, MSi, atas dukungan baik moril maupun materil, dan juga rekan-rekan di Bagian Administrasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang

juga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2007

Penulis

Irwansyah Wijaya Pohan



DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Hipotesis	10
BAB II. URAIAN TEORITIS	12
A. Pengertian Organisasi dan Prinsip Organisasi	12
B. Bentuk-Bentuk Struktur Organisasi	18
C. Unsur-Unsur Dalam Struktur Organisasi	22
D. Implementasi.....	23
E. Pendelegasian Tugas dan Wewenang	24
F. Pengertian Tentang Kebijakan	26
G. Aspek-Aspek Kebijakan	28
BAB III. METODE PENELITIAN	31
A. Bentuk Umum Penelitian	31

B. Lokasi Penelitian	32
C. Populasi dan Sampel	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Kerangka Konsep	34
F. Variable Penelitian	35
G. Teknik Analisa Data	37
BAB IV. KECAMATAN PERCUT SEI TUAN	40
A. Sejarah Singkat Kecamatan Percut Sei Tuan	40
B. Letak dan Geografis	40
C. Kependudukan dan Perekonomian	42
D. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Percut Sei Tuan	45
BAB V. ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Tugas dan Wewenang Camat Dalam Kaitannya Dengan Pelimpahan Wewenang	51
B. Organisasi Kecamatan	72
C. Pendelegasian dan Penarikan Kewenangan	77
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

Peraturan Bupati Deli Serdang No. 2534 Tahun 2005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dari keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang

dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Sistem otonomi daerah juga menempatkan peran yang besar pada di tingkat Kabupaten/Kota. Agar sistem otonomi tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan semua pihak maka efektivitas tugas dari Bupati/Walikota selaku kepala daerah harus dapat mencapai semua jenjang dalam suatu wilayah. Untuk hal yang demikian maka dalam pelaksanaan otonomi tersebut perlu dilakukan pelimpahan tugas dari Bupati/Walikota kepada pihak kecamatan.

Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota kepada camat akan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan menjadi lebih akomodatif dan fleksibel artinya dengan kewenangan yang ada, Camat diharapkan mampu menyelesaikan sendiri permasalahan yang timbul dan berkembang di masyarakat serta mampu melahirkan berbagai kebijakan positif yang menyentuh langsung kepada praktek penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
- Azwar, Azrul, *Administrasi Perusahaan*, Binarupa Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta, 1996.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.
- Handoko, T. Hani, *Manajemen*, Cetakan kelima. BPFE-UGM, Yogyakarta, 1998.
- Kotler, Philip dan Amstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Gramedia, Jakarta, 1994.
- Manullang, M, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Ghalia Indonesia, 2002.
- Moenir, H. A. S, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, Karya, Bandung, 2006.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Bandung 1990.
- Nisjar Karhi dan Winardi, *Teori Sistem dan Pendekatan Sistem Dalam Bidang Manajemen*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.
- Pawitro, Teddy, *Pemasaran: Dimensi Falsafah, Disiplin dan Keahlian*, Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya, Jakarta, 1993.
- Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Siagian, Sondang P, *Peranan Staf Dalam Manajemen*, Cetakan Kesembilan, PT. Gunung Agung, Jakarta, 2000.
- Soekadijo, R.G, *Anatomi Pariwisata, Manajemen Usahawan Lembaga Management FE UI*, Jakarta, 1996.

- Soetjipto, Budi W, *Service Quality*, Jakarta: Manajemen Usahawan – Lembaga Management FE – UI.
- Stoner. James A.F. *Manajemen*, Terjemahan Alfonso Sirait, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Sudjana, *Statistik*, Tarsito, Bandung, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2005.
- Sumantri, Jujun Surya, *Filsafat Ilmu*, Sinar Harapan, Jakarta, 1992.
- Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, Cetakan Kesembilan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Terry, George, *Principles of Management*, Third Edition, Richard D. Irwin Inc. Homewood Illionis, 1960.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Wasistiono, Sadu, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Fokus Media, Bandung, 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Bupati Deli Serdang No. 2534 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.